



Judul Tugas Akhir Skripsi:

**KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME (APU/PPT) UNI EROPA TERHADAP *HIGH-
RISK THIRD COUNTRIES* PERIODE 2015-2020**

Tugas Akhir Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial Program Studi Hubungan Internasional

Nama : Muhammad Taqaruby Narzain

NIM : 1810412118



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN
INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

**KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME (APU/PPT) UNI EROPA TERHADAP
HIGH-RISK THIRD COUNTRIES PERIODE 2015-2020**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Awal untuk Mencapai Gelar
Sarjana Sosial Jurusan Hubungan Internasional**

Disusun Oleh:

Muhammad Taqaruby Narzain 1810412118

Diampu Oleh:

**Dosen Pembimbing I Dairatul Maarif, S.IP.,MA Dosen
Pembimbing II Rizky Hikmawan, S.IP., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Muhammad Taqaruby Narzain

NRP : 1810412118

Program Studi : Hubungan Internasional

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 29 November 2022

Yang menyatakan



Muhammad Taqaruby Narzain

PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Taqaruby Narzain
NRP : 1810412118
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Hubungan Internasional

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non-
eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang
berjudul:

**KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME (APU/PPT) UNI EROPA TERHADAP *HIGH-RISK THIRD
COUNTRIES* PERIODE 2015-2020**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan,
mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data
(*database*), merawat dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak
cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya :

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 29 November 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Taqaruby Narzain

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Muhammad Taqaruby Narzain
NIM : 1810412118
Program Studi : S1 Hubungan Internasional
Judul Skripsi : KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME (APU/PPT) UNI EROPA
TERHADAP HIGH-RISK THIRD COUNTRIES PERIODE 2015-
2020

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Pembimbing I



Dairatul Ma'arif, S.IP., M.A

Penguji II



Rizky Hikmawan, S.IP., M.Si

Penguji I



Dr. Ardli Johan Kusuma, S.IP., M.HI

Kepala Program Studi Hubungan Internasional



Andi Kurniawan, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) Uni Eropa Terhadap *High-risk Third Countries* Periode 2015-2020. Skripsi ini dibuat guna memenuhi tugas akhir untuk meraih gelar sarjana Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dairatul Maarif, S.IP.,MA selaku dosen pembimbing pertama penulis dan Bapak Rizky Hikmawan, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing kedua penulis, yang telah banyak memberikan saran yang sangat sangat bermanfaat. Di samping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Mamah dan Papah serta seluruh keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan penulis semangat dan doa hingga penulisan ini selesai. Penulis juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan yang ada dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun skripsi atau karya tulis ilmiah oleh mahasiswa/i UPN Veteran Jakarta dan lainnya.

Jakarta, 13 Desember 2022

Muhammad Taqaruby Narzain

**KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME (APU/PPT) UNI EROPA TERHADAP *HIGH-
RISK THIRD COUNTRIES* PERIODE 2015-2020**

Muhammad Taqaruby Narzain

ABSTRAK

FATF menjelaskan, bahwa situasi pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin buruk. Dengan demikian FATF semakin menyerukan Negara-negara untuk bertindak melawan praktek pencucian uang dan mendorong untuk lebih gencar memerangi praktek pencucian uang. UE tergolong wilayah yang cukup serius dan terhitung aktif dalam memerangi praktik pencucian uang, pada tahun 2015 Uni Eropa mengadopsi kerangka peraturan modern yang mencakup beberapa peraturan dan direktif, yaitu direktif keempat UE yang salah satu kebijakannya adalah menerapkan kebijakan terhadap negara ketiga, dimana komisi memiliki kewajiban hukum untuk mengidentifikasi negara-negara ketiga berisiko tinggi yang memiliki kekurangan strategis dalam rezim APU/PPT-nya. Yang mana kebijakan tersebut menuai kontroversi di tengah banyak pengamat dan masyarakat dunia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan UE terhadap Negara ketiga berisiko tinggi tersebut serta mengungkap sebenarnya apa yang melatar belakangi UE membentuk kebijakan tersebut, Penelitian ini juga menggunakan teori Model Kebijakan Luar Negeri Adaptif dan konsep Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Hasil temuan Peneliti adalah bahwa kebijakan tersebut dibentuk berdasarkan prinsip kebijakan luar negeri dan keamanan bersama UE, yang dirancang untuk menyelesaikan konflik dan mendorong pemahaman internasional, didasarkan pada diplomasi dan penghormatan terhadap aturan internasional. Dan UE juga membuktikan bahwa kebijakan tersebut bukan saja merugikan bagi negara ketiga terkait namun juga dapat membantu untuk ekosistem keuangan negara tersebut dan bahkan internasional, walaupun diakui masih banyak kekurangan dan kekosongan, dari metodologi serta implementasi dari kebijakan tersebut.

Kata Kunci: Uni Eropa, FATF, Kerangka APU/PPT, Kebijakan Luar Negeri, Negara ketiga berisiko tinggi.

EUROPEAN UNION ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM (AML/CFT) POLICY ON HIGH-RISK THIRD COUNTRIES DURING THE PERIOD OF 2015-2020

Muhammad Taqaruby Narzain

ABSTRACT

FATF explained, that the situation of money laundering and terrorism financing is getting worse. Thus the FATF increasingly calls on States to act against money laundering practices and encourages more aggressive efforts to combat money laundering practices. The EU is classified as a region that is quite serious and includes being active in combating money laundering practices, in 2015 the European Union adopted a modern regulatory framework which includes several regulations and directives, namely the EU's fourth directive, one of its policies is to apply policies to third countries, where the commission has obligations law to identify high-risk third countries that have strategy deficiencies in their AML/CFT regimes. Which policy reaped controversy in the midst of many observers and the world community. By using a descriptive qualitative research method, this study aims to analyze EU policies towards these three high-risk countries and reveal what actually motivated the EU to form these policies. This study also uses the European Union Foreign Policy theory and the concept of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. The results of the Researcher's research are that the policy is formed based on the principles of the EU's common foreign and security policy, which is designed to resolve conflicts and promote international understanding, based on diplomacy and respect for international rules. And the EU has also proven that this policy is not only detrimental to the related third countries but can also help the country's financial ecosystem and even internationally, although it is recognized that there are still many deficiencies and recoveries, from the methodology and implementation of these policies.

Keywords: *European Union, FATF, APU/PPT Framework, Foreign Policy, High-risk third countries.*

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
1.4.1. Manfaat Akademis	15
1.4.2. Manfaat Praktis	16
1.5. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1. Konsep dan Teori Penelitian	18
2.1.1. Teori Kebijakan Luar Negeri	18
2.1.2. Konsep Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT)	27
2.2. Kerangka Pemikiran	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1. Objek Penelitian	56
3.2. Jenis Penelitian	59
3.3. Teknik Pengumpulan Data	60
3.4. Sumber Data	62
3.5. Teknik Analisis Data	63
3.5.1. Reduksi Data	63
3.5.2. Penyajian Data	64
3.5.3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.....	64
3.6. Tabel Rencana Waktu.....	65
BAB IV DINAMIKA KEBIJAKAN APU/PPT UNI EROPA TERHADAP HIGH-RISK THIRD COUNTRIES DAN FENOMENA PRAKTIK PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORIS DI UNI EROPA	66
4.1. Direktif Anti Pencucian Uang ke-4 (4AMLD).....	66
4.1.1. Rekomendasi FATF 2012 sebagai dasar untuk 4AMLD.....	70
4.2. Direktif Anti Pencucian Uang ke-5 (5AMLD).....	72
4.3. Kasus Pencucian Uang di Uni Eropa	78
4.4. Kasus Pendanaan Teroris di Uni Eropa.....	81

BAB V KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU/PPT) UNI EROPA TERHADAP <i>HIGH- RISK THIRD COUNTRIES</i>	87
5.1. <i>High-Risk Third Countries</i> Dalam Direktif Anti Pencucian Uang ke-4 (4AMLD).....	87
5.1.1. Latar Belakang Dibentuknya Kebijakan Daftar <i>High-Risk Third Countries</i> oleh Uni Eropa	94
5.1.1. Metodologi Identifikasi Negara Ketiga Berisiko Tinggi UE	98
5.1.2. Proses Otonom Pencatatan Negara Ketiga Berisiko Tinggi UE ...	102
5.1.3. Customers Due Diligence	108
5.2. <i>High-Risk Third Countries</i> Dalam Direktif Anti Pencucian Uang ke-5 (5AMLD).....	115
5.3. Fasilitas Global APU/PPT Uni Eropa	119
5.3.1. Evolusi daftar UE	122
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	138
6.1. Kesimpulan	138
6.2. Saran.....	140
6.2.1. Saran Praktis.....	140
6.2.2. Saran Teoritis	141
DAFTAR PUSTAKA	144

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Negara ketiga berisiko tinggi Menurut UE

Tabel 4.1. Jumlah serangan teror jihadis yang di UE (2017-2020)

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. 10 Negara Teratas Dengan Risiko Pencucian Uang Terbesar 2018

Grafik 1.2. 10 Negara Teratas Dengan Risiko Pencucian Uang Terkecil 2018

Grafik 4.1. Laporan Aktivitas Mencurigakan UE 2018-2019

Grafik 4.2. Laporan Aktivitas Mencurigakan UE 2018-2019

Grafik 4.3. Kasus Terorisme di Uni Eropa Tahun 2015-2020

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1. *Overview of the EU listing proces*

DAFTAR SINGKATAN

APU/PPT	: Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan terorisme
TPPU/TPPT	: Tindak Pidana Pencucian Uang/Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
FATF	: Financial Action Task Force
UE	: Uni Eropa
FIU	: Financial Inteligent Unit
STR	: Suspicious Transaction Report
RBA	: Risk Based Approach
3AMLD	: 3 th Anti Money Laundering Directive
4AMLD	: 4 th Anti Money Laundering Directive
5AMLD	: 5 th Anti Money Laundering Directive
NPO	: Non Profit Organisation
CFSP	: Common Foreign and Security Policy
TEU	: Treaty on European Union
CDD	: Customers Due Diligence
ECDD	: Enhanced Customer Due Diligence
SCDD	: Simplified Customer Due Diligence
EEAS	: European External Action Service
DNFBP	: Designated Non-financial Business and Professions
INTERPOL	: International Criminal Police Organization
PEP	: Politically Exposed Person
RUSI	: The Royal United Services Institute
MVTS	: Money or Value Transfer Services
PBJ	: Penyedia Barang dan Jasa
SRB	: Self-regulatory Body
MLA	: Mutual Legal Assistance
MoU	: Momerandum of Understanding

FGD	: Focus Group Discussion
ESA	: European Supervisory Authorities
NRA	: National Risk Assessment
KYC	: Know Your Customers
UNODC	: The United Nations Office on Drugs and Crime
SAR	: Suspicious Activity Reports
MER	: Mutual Evaluation Reports
FACT	: Financial Accountability and Corporate Transparency
TFEU	: Treaty on the Functioning of the European Union
EGMLTF	: Expert Group on Anti-money Laundering and Countering Terrorist Financing
EBA	: The European Banking Authority
UBO	: Ultimate Beneficial Owners
GF-AML/CFT	: Global Facility on Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
COCG	: The Code of Conduct Group

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kontrak Penulisan Skripsi

Lampiran 2 Kartu Bimbingan Penulisan Skripsi

Lampiran 3 Form Persetujuan Sidang Tugas Akhir Dosen Pembimbing I dan II

Lampiran 4 Email Permohonan Wawancara

Lampiran 5 Bukti Wawancara